

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya (Manik, 2018). Secara sederhana kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting (Bappedda DIY, 2017). Lingkungan hidup atas lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang terdiri dari segala unsur yang hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan lingkungan yang terdiri dari segala unsur tidak hidup seperti air, tanah, batu, udara, iklim dan sebagainya.

Setiap aktivitas ataupun kegiatan manusia secara langsung dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem yang bisa dilihat dari perubahan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa perkembangan yang terjadi saat ini melalui aktivitas manusia menurunkan sumber daya lingkungan yang seharusnya menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu dalam mendukung keberlangsungan kehidupannya. Dalam ekologi, manusia dikenal sebagai *man ecological dominant*, yang artinya manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya (IPQI, 2014). Oleh karena kemampuan akalnya, penentuan lingkungan yang baik ataupun buruk bergantung pada manusia itu sendiri. Menurut (Fakher, 2019) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yaitu pertumbuhan

ekonomi, pendapatan negara/GDP, jumlah angka kematian dan kelahiran, politik negara yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil, investasi asing, transportasi dan konsumsi energi perkapita.

Di Indonesia, kualitas lingkungan hidup diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan generalisasi dari IKLH seluruh Provinsi di Indonesia, di mana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi/Kabupaten di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : 1) Kualitas air sungai, yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phosphat, Fecal Coliform. Kualitas air memiliki bobot 37,6 % dalam perhitungan IKLH. 2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂. Kualitas udara memiliki bobot 40,5 % dalam perhitungan IKLH. 3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan vegetasi hutan dan tutupan

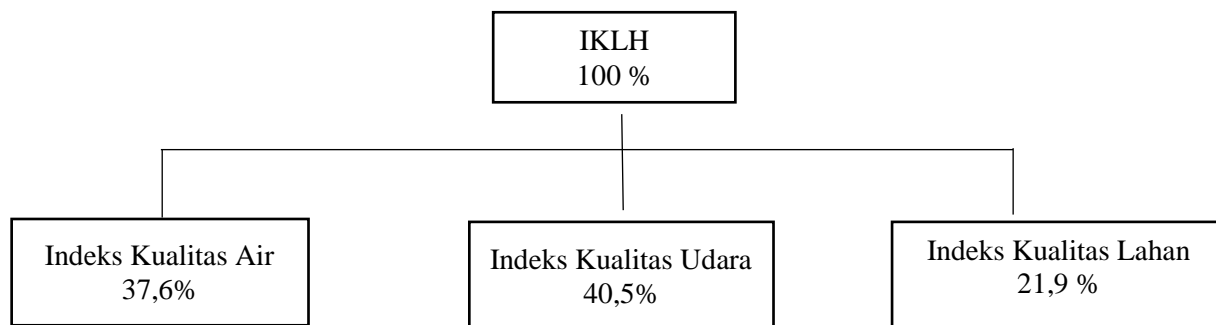
vegetasi non hutan (RTH). Kualitas tutupan lahan memiliki bobot 21,9 % dalam perhitungan IKLH

Tabel 2.1 Kriteria dan Indikator IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	pH	37,6%
		BOD	
		COD	
		DO	
		TSS	
		NO ₃	
		Total Phospat	
		Fecal Coliform	
2	Kualitas Udara	SO ₂	40,5%
		NO ₂	
3	Kualitas Tutupan Lahan	Luas tutupan vegetasi hutan dan luas vegetasi non hutan	21,9%

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021

Parameter dan persentase dari setiap indikator untuk perhitungan IKLH tahun 2021 masih belum ada perubahan dari tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada 2.1 diatas



Adapun tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), yaitu: (1) Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), ada tiga indikator yang digunakan, yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air. Indeks kualitas air dihitung menggunakan metode IP (Indeks Pencemaran). Adapun beberapa parameter dalam mengukur Indeks Kualitas Air, yaitu: TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi nilai IKA, di antaranya adalah (1)

Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan pada beberapa sumber air; (2) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dapat dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (3) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi serta sedimentasi. Dalam perhitungan IKLH, IKA memiliki proporsi 37,6%.

Berikut perhitungan Indeks Kualitas Air :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j . Dalam perhitungan ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001. Nilai $PI_j > 1$ artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas II sebagaimana dimaksud PP No. 22 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran (PI_j) setiap sampel untuk parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO_3-N , Total Phosphat, Fecal Coliform.

3) Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0 % - 100 % (terbaik-terburuk) jumlah sampel dengan nilai $PI_j > 1$, menjadi indeks dalam skala 0-100 (terbaik-terburuk).

4) Selanjutnya nilai IKA dihitung dari rata-rata IKA semua sampel tersebut.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal Dinas Lingkungan Hidup, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, masyarakat serta pelaku usaha.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Indonesia diukur berdasarkan dua parameter, yaitu NO_2 yang menggambarkan emisi kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin serta SO_2 yang menggambarkan emisi industri dan kendaraan bermotor dengan bahan bakar solar dan sulphur lainnya. Dalam perhitungan IKLH, IKU memiliki proporsi sebesar 40,5%.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).
- b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO₂ dan NO₂ pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).
- c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota
- d. Menghitung indeks udara model EU (I_{EU})

$$I_{eu}' = \frac{(2I_{eu \text{ NO}_2} + 2I_{eu \text{ SO}_2})}{4}$$

Selanjutnya indeks udara model EU (I_{EU}) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$$

Keterangan:

- I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi

dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan hasil pemantauan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien SO₂ Ref_{EU}

- Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO_2 adalah $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan untuk NO^2 adalah $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak

lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Adapun parameter yang digunakan dalam pengukuran IKTL yaitu adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi, dan karakteristik wilayah

secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Di dalam IKLH, IKTL memiliki proporsi sebesar 21,9%.

Penghitungan Indeks Kualitas Lahan diawali dengan melakukan penjumlahan luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non hutan.

Penghitungan indeks tutupan hutan menggunakan rumus :

$$TH = \frac{LTH + 0,6LTnh}{LWK}$$

Keterangan :

TH = Tutupan Hutan

LTH = Luas Tutupan Hutan

LWK = Luas Wilayah Kota

LTnh = Luas Tutupan Vegetasi non Hutan

Kemudian dilakukan konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah provinsi melalui persamaan sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

Keterangan :

IKL = Indeks Kualitas Lahan

TH = Tutupan Hutan

Adapun perhitungan IKLH berdasarkan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021) untuk menghitung IKLH Provinsi adalah dengan rumus:

$$\text{IKLH Kabupaten} = (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5\% \times \text{IKU}) + (21,9\% \times \text{IKTL})$$

Keterangan :

IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Untuk mengetahui apakah IKLH secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sudah sangat baik atau masih perlu ditingkatkan dinilai dari predikat dalam IKLH. Berikut tabel predikat nilai IKLH yang menentukan bagaimana kondisi IKLH:

Tabel 2.1 Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1.	Sangat baik	$90 \leq \text{IKLH} < 100$
2.	Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
3.	Sedang	$50 \leq \text{IKLH} < 70$
4.	Kurang baik	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
5.	Sangat kurang baik	$0 < \text{IKLH} \leq 25$

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah 2023

B. Pengertian Kebijakan Pemerintahan

1. Pengertian dan Istilah Kebijakan

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "Policy" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Menurut Irfan Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata "Wisdom" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis

(2007) mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Keban (2008), melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan- alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip- prinsip tertentu.

Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar (UUD), dan Program Pembangunan Nasional. Keputusan jabarannya berupa undang- undang (UU) dan Program Pembangunan Daerah disebut kebijakan. Bila UU disebut sebagai kebijaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat disebut kebijakan. Seterusnya bila PP dapat disebut kebijaksanaan, dan Keputusan-Keputusan Menteri (Kepmen) dapat dinamakan kebijakan, dan sebagainya.

Pengertian kebijaksanaan yang menjadi acuan dalam pembahasan ini pemikiran/pertimbangan dan keputusan yang lebih jauh dan mendalam, bukan keputusan untuk melanggar sesuatu. Walaupun istilah kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua kata itu mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk lebih jelas memahami pengertian diatas, berikut ini dikemukakan definisi kebijakan dari beberapa orang ahli, diantaranya.

1. Lasswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.

2. Rakasataya, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

3. Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

4. Anderson, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

5. Mac Rae dan Wilde, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar.

Definisi-definisi kebijakan diatas, selain mempunyai perbedaan tertentu karena masing-masing ahli itu memberikan sudut pandang masing-

masing, terdapat suatu persamaan bahwa kebijakan itu pada dasarnya serangkaian tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan kata lain definisi kebijakan oleh para ahli diatas diperoleh suatu pengertian umum lebih lengkap mengenai kebijakan yaitu "suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

2. Pengertian Istilah Pemerintahan

Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Pengertian diatas menunjukan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara

bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "*Goverment*" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah *goverment* paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukkan; (1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atau pihak lain,

(2) Masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai,

(3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan

(4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Dari pengertian diatas, Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. S. Pamudji dalam bukunya: kepemimpinan pemerintahan di Indonesia mendefenisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).

Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Istilah eksekutif dari pendapat diatas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang

pemerintahan dalam arti luas. Sementara dalam arti administrasi, eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalir perintah-perintah dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai.

3. Definisi Kebijakan Pemerintahan

Defenisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli. Beberapa definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli itu seperti berikut :

1. Mc Rae dan Wilde

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Satu contoh dari definisi ini seperti; keputusan seorang Rektor menerima seorang mahasiswa pindahan dari Universitas lain, itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah, karena hanya berlaku dan berdampak pada seorang. Tetapi bila keputusan tersebut berkenaan dengan penentuan syarat-syarat yang diperlukan bagi semua mahasiswa pindahan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan masalah itu hal itu baru disebut sebagai kebijakan pemerintahan.

2. **Anderson**

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah". Jadi menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti; lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal.

Disini kebijakan pemerintahan itu dapat dikembangkan oleh lembaga/badan-badan pemerintahan, pula oleh pejabat pemerintah pada lembaga/badan itu baik di skope nasional, regional dan lokal.

3. **B. R. S. Parker**

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subjek atau respons terhadap suatu keadaan krisis".

Maksud definisi ini bahwa, kebijakan pemerintah itu mempunyai ukuran (asas) dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab/memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat. Salah satu contoh seperti ; pemerintah membangun rumah-rumah murah (sederhana) bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah sendiri di seluruh daerah.

Definisi kebijakan pemerintahan dan contoh-contoh sebagaimana terlihat diatas, dapat membuat anda memahami apa yang disebut

kebijakan pemerintahan itu. Dengan demikian, secara umum muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.

Definisi kebijakan pemerintahan seperti terurai diatas secara umum memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi).
2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat.
3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya.
4. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
6. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik.

4. Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintahan

National Association of Schools of Public Affair and Administration (NASPAA) mencoba merumuskan ruang lingkup bidang kajian kebijakan pemerintahan, meliputi lima hal berikut ini :

1. Suatu proses memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.
2. Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif.
3. Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang, bidang fungsional tertentu, seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
4. Memerlukan kecakapan-kecakapan untuk menganalisis sosio ekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program.
5. Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat (*public interest*). Dengan pengetahuan dan komitmen itu analisis yang tajam dilakukan dengan mempergunakan data yang ada mengenai luasnya pilihan-pilihan masyarakat umum (*public choice*), dan program yang mempercepat adanya kesempatan yang sama dan kesejahteraan, pengukuran-pengukuran terhadap pilihan masyarakat dan pengaruhnya, prosedur penilaian yang jujur atas keuntungan dan kerugian dan aneka macam milik umum dan pengukuran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi kebijakan dan evaluasinya.

Gerald Caiden dengan beberapa revisi dan tambahan dari Mifta Thoha (1984), mengemukakan, ruang lingkup studi kebijakan pemerintahan itu meliputi;

1. Adanya partisipasi masyarakat (*public participation*).

Pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan semua isu (masalah) yang timbul. Partisipasi masyarakat disini menjadi amat penting berwujud pemberian saran, kritik, pemikiran bagi pemerintah (pembuat kebijakan) untuk bersama-sama memikirkan alternatif-alternatif guna mendapatkan cara-cara terbaik bagi pemecahan masalah dengan menetapkan kebijakan tertentu, ikut melaksanakannya dan menikmati hasilnya. Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna.

2. Adanya kerangka kerja policy (*policy framework*).

Kerangka kerja kebijakan (*policy*) disini adalah batas kajian yang mengkonstruksi semua faktor potensial yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah/dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan, meliputi :

- (1) apakah tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dibuat?
- (2) bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintahan?
- (3) apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat dimanfaatkan?
- (4) siapakah pelaku yang terlibat dalam kebijakan pemerintahan dan apakah mereka mampu dan melaksanakannya?
- (5) bagaimanakah faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang bakal dibuat, mendukung, menolak

atau pasif ? (6) bagaimana strategi yang harus dijalankan didalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah ? (7) berapa lama waktu yang tersedia merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ?

3. **Adanya strategi-strategi policy (*policy strategy*).**

Studi kebijakan pada masa-masa terakhir ini mulai banyak memperhatikan/ memperhitungkan sifat kompleks dan saling ketergantungannya beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Suatu masalah sosial tampil kepermukaan, membutuhkan kebijakan untuk pemecahannya tidak lagi berasal dari satu bidang kajian saja. Masalah itu saling kait-mengkait dengan bidang kajian lainnya. Sebagai contoh; masalah tawuran pelajar belakangan selain sangat terkait dengan masalah kurang optimalnya pembinaan oleh guru-guru, juga kurangnya pembinaan dari para orang tua di rumah. Demikian pula masalah sosial lainnya.

Karena itu, pembuat kebijakan harus mampu mengamati kesemuanya secara jeli sebelum menetapkan strategi yang dapat diandalkan. Pembuat kebijakan harus mampu mempertanyakan hal-hal berikut ; (1) Apakah yang menjadi persoalan sebenarnya sehingga darinya patut dibuatkan policynya? (2) bagaimanakah persoalan dan kemungkinannya berkaitan dengan persoalan pemecahan bidang lainnya ? (3) kepentingan-kepentingan siapakah yang bakal dipengaruhi dengan adanya persoalan dan pemecahannya nanti ? (4) apakah ada kepentingan-kepentingan gabungan yang bakal merasa puas karena terpenuhi dengan adanya

kebijakan tersebut? (5) hal-hal manakah yang dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak? (6) sampai berapa jauhkah kompromi dimungkinkan untuk menjamin adanya keterbukaan pilihan-pilihan dimasa depan atau memperhitungkan masa lalu dengan mengharapkan masa depan lebih cerah ?

4. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (*public interest*).

Semua persoalan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat belum tentu mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat pada umumnya. Ada kalanya persoalan-persoalan itu merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat, kalau mempunyai pengaruh yang luas dan diangkat kepermukaan pentas oleh masyarakat.

Kepentingan-kepentingan masyarakat umum itu dirumuskan hendaknya memberikan keseimbangan dengan kepentingan pribadi yang terorganisasikan sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan/kebijaksanaan pemerintahan.

5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dan kemampuan kebijakan pemerintahan.

Suatu kebijakan pemerintahan supaya dapat diterapkan secara lebih baik sangat ditentukan oleh adanya pendirian lembaga riset mengenal kebijakan negara/ pemerintahan yang bersifat independen.

Lembaga ini nantinya mampu menggali implikasi jangka panjang dari suatu kebijakan dengan cara; (1) menggambarkan masa depan yang realistik, menciptakan unit-unit baru pembuat

kebijaksanaan/kebijakan, (2) merancang kembali organisasi- organisasi yang menangani program-program pokok, (3) penilaian/evaluasi dari kebijakan yang telah ada, (4) perencanaan kebijakan, (5) sistem anggaran yang inovatif, dan lain sebagainya. Lembaga semacam ini amat bermanfaat untuk menutup kesenjangan antara harapan (teori) dari suatu kebijakan yang dibuat dan di praktek/ implementasinya.

6. Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.

Studi tentang pembuatan kebijakan negara/pemerintahan didasarkan atas kebijakan yang nyata (*actual policies*). Pada masa lalu umumnya studi kebijakan pemerintahan mempunyai isi antara lain ;

1. penelitian mengenai permainan kekuasaan,
2. partisipan-partisipan dalam kebijakan pemerintahan, dan
3. pelaku-pelaku pembuat kebijakan yang menjelaskan variabel-variabel dari suatu kebijakan.

Sekarang ini isi kebijakan pemerintah banyak mengamati tentang;

1. pelaku-pelaku kebijakan pemerintah,
2. hubungan-hubungan diantara mereka,
3. strategi-strategi kebijakan pemerintah, dan
4. hasil- hasil yang mempengaruhi sistim sosial dan tujuan- tujuan yang bakal dicapai. Kedua isi kebijakan pemerintahan baik dahulu maupun sekarang telah memberikan andilnya dalam menciptakan proses pembuatan kebijakan- kebijakan pemerintah yang lebih baik

partisipan-partisipan dalam kebijakan pemerintahan, dan pelaku-pelaku pembuat kebijakan yang menjelaskan variabel-variabel dari suatu kebijakan.

C. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
2. Data masa lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah.
6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Anggaran harus dibuat serealistik mungkin dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan.

2. Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi manajemen puncak (direksi).
3. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi justru termotivasi.
4. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini. Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini tidak diperhatikan:
 1. Pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak memiliki wawasan yang luas.
 2. Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas.
 3. Tidak didukung oleh masyarakat.
 4. Dana tidak cukup.

A. Kebijakan anggaran pemerintah daerah

Teori Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Anggaran keuangan pemerintah daerah adalah rencana target pendapatan dan belanja yang akan dicapai dalam satu periode (Fathurrahman, 2012). Anggaran ini mengambil peranan penting dalam menjaga jalannya pemerintahan untuk menjalankan pelayanan publik. Program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan sejalan dengan kapasitas keuangan yang dimiliki (Akhmad, 2015). Setelah itu, kapasitas keuangan memberikan koridor pada batasan pengeluaran belanja yang dapat dilakukan.

Anggaran keuangan pemerintah daerah merupakan sarana koordinasi manajemen antarbagian dalam pemerintahan (Taufikurohman et al, 2011).

Anggaran ini juga menjadi dokumen politik yang membuktikan adanya komitmen antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan keuangan publik.

Anggaran keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan prioritas dalam menentukan tingkat layanan publik kepada masyarakat (Wadma, Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan, 2016). Dalam proses monitoring, anggaran mencerminkan kondisi keuangan dan proses pelaksanaan operasional pemerintah daerah. Selain sebagai dokumen perencanaan dan monitoring, anggaran pemerintah daerah digunakan sebagai dokumen akuntabilitas dan transparansi keuangan dari pemerintah daerah kepada publik atau masyarakat.

Anggaran keuangan pemerintah 14 daerah menginformasikan segala aktivitas dan penggunaan dana organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Hardinandar, 2020). Seluruh pengeluaran pendapatan dan belanja akan dilaporkan kepada publik baik rencana maupun realisasi. Anggaran keuangan pemerintah daerah menunjukkan kondisi keuangan dari pemerintah daerah mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan keuangan.

Dalam operasional, anggaran keuangan pemerintah daerah harus memiliki strategi yang baik dalam mengontrol sumber daya yang dimiliki. Kontrol sumber daya ini bertujuan untuk optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pengeluaran belanja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Ritonga, 2014). Pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan dalam melakukan anggaran keuangan. Dari beberapa literatur, anggaran

keuangan pemerintah daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Ritonga, 2014):

1. Alat Perencanaan Perumusan tujuan dan sasaran kebijakan adalah salah satu fungsi anggaran keuangan pemerintah. Rumusan tujuan dan sasaran kebijakan ini mengatur satuan kerja dibawah pemerintah daerah dalam merundi biaya program dan kebijakan. Disamping itu, hal ini juga merencanakan sumber pendapatan dan nilainya yang akan diperoleh pemerintah daerah (Ritonga, 2014).
2. Alat Kebijakan Fiskal Anggaran keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengelola kebijakan fiskal. Melalui anggaran keuangan pemerintah 15 daerah,kebijakan fiskal akan mempermudah pemerintah daerah dan satuan kerjanya untuk memprediksi dan mengestimasi interfensi ekonomi dan layanan publik (Mizkan, Kamaliah, & Agusti, 2015).
3. Alat Pengendalian Angaran berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja pemerintah. Mekanisme persetujuan legislatif dan musyawarah perencanaan pembangunan menjadi prosedur dalam anggaran keuangan pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah daerah (Maizunati, 2017).
4. Alat Penilaian Kerja Penilaian kerja pemerintah daerah dapat ditunjukkan dengan tata kelola anggaran keuangan. Penilaian kinerja pemerintah daerah dinilai berdasarkan pencapaian serapan, efisiensi dan dampak pelaksanaan anggaran (Fathurrahman, 2012).

5. Alat Motivasi Anggaran digunakan sebagai motivasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam optimisme pembangunan ekonomi daerah. Dengan membuat anggaran yang tepat, pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kebijakan sesuai target dan tujuan pembangunan daerah, sehingga manajemen dapat dijalankan dengan kinerja yang baik (Primawaty, 2017).

6. Alat Politik Anggaran keuangan pemerintah merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Secara politik, anggaran keuangan dapat menjadi alat politik bagi legislatif (sebagai representasi masyarakat) untuk mendukung dan mengoreksi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah (eksekutif) (Astuti & Mispiyanti, 2019).

7. Alat Menciptakan Ruang Publik Anggaran keuangan pemerintah daerah diusulkan dan disusun oleh beberapa pihak. Para pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penganggaran keuangan publik. Proses penganggaran inilah yang mampu menciptakan ruang publik, bahwa keuangan pemerintah disusun dan diawasi bersama-sama (Taufikurohman et al, 2011).

8. Alat Koordinasi dan Komunikasi Komunikasi dan koordinasi dilakukan antar satuan kerja maupun dengan satuan organisasi diluar pemerintah daerah. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan dalam setiap tahap perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu memetakan dan mengatur koordinasi agar kinerja seluruh satuan kerja bekerja efektif dan efisien (Taufikurohman et al, 2011). Fungsi anggaran keuangan

pemerintah daerah sangat banyak, sehingga konsep dan berbagai penelitian terus dikembangkan. Hal ini karena anggaran 17 keuangan terutama di sektor pemerintah menyangkut layanan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dalam proses penganggaran, prinsip-prinsip anggaran keuangan pemerintah daerah meliputi (Fathurrahman, 2012):

1. Keutuhan Anggaran Pendapatan dan belanja pemerintah daerah harus terhimpun dan tersusun dalam satu kesatuan yang utuh. Keutuhan informasi anggaran keuangan ini krusial karena informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan saling berhubungan antar pos anggaran. Selain hubungan antar pos anggaran, keutuhan ini juga mengakomodir hubungan periodik anggaran yang berkesinambungan.
2. Otorisasi Oleh Legislatif Legislatif memiliki otorisasi publik terhadap anggaran sebelum eksekutif membelanjakan anggaran yang telah disahkan bersama legislatif.
3. Komprehensif Anggaran harus merepresentasikan seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara terperinci. Dengan demikian, adanya dana nonbudgetair (diluar anggaran) sebenarnya telah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
4. Periodik Anggaran keuangan disusun berdasarkan periode tertentu agar memiliki batasan waktu dalam pelaksanaan. Anggaran keuangan 18 pemerintah daerah disusun berdasarkan periode 1 tahun dari bulan Januari ke Desember.

5. Nondiscretionary Appropriation Anggaran keuangan pemerintah daerah sebagaimana jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
6. Jelas dan Dapat Diketahui Anggaran keuangan pemerintah daerah disusun secara sederhana, mudah dipahami masyarakat, dan tidak ambigu. Disamping itu, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas sebagai tanggung jawab dan transparansi pengelolaan anggaran.

D. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia adalah asset perusahaan yang harus dirawat. Pemberdayaan sumber daya manusia yang di kelola secara teratur dan sistematis akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan kompetitif. Di zaman yang berkembang pesat saat ini perusahaan harus extra selektif dalam memilih sumber daya manusia yang kompetitif, mumpuni serta memiliki daya saing yang tinggi. Manajemen perusahaan khususnya bagian HRD (Human Resource Development) harus selektif dalam menyeleksi calon pegawainya. Menurut Hamali (2016:2) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal.

Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisien organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Hamali (2016:2) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, 1 2 yakni sumber daya manusia (human resource) dan sumber daya non manusia (nonhuman resource). Kelompok sumber daya non manusia ini mencakup modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain.

Pada prinsipnya sumber daya manusia adalah satu–satunya sumber daya yang dapat menentukan tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan yang jelas serta dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, kemungkinan besar sulit mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.

Penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan birokrasi, birokrasi dalam hal ini mengacu pada sistem administrasi yang dilaksanakan oleh pejabat negara pada tingkat pangkat dan jabatan, dengan penekanan yang jelas pada peran SDM pemerintah. Oleh karena itu, patokan awal sebuah reformasi birokrasi harus absolut diawali dari reformasi terhadap pengelolaan SDM aparturnya. Modernisasi sebuah manajemen SDM aparatur menjadi proses penting yang harus dilakukan guna mewujudkan pegawai yang jujur, terampil, cakap, serta berpengalaman untuk mencapai pengelolaan birokrasi yang

baik.(Ashari, 2010).

Konsep manajemen kepegawaian pemerintah tidak dapat dipisahkan dari manajemen kepegawaian, karena istilah manajemen kepegawaian, atau kepegawaian administrasi, digunakan dalam administrasi Amerika. Dalam melaksanakan penyelenggaraan aparatur sipil negara harus didasarkan pada perbandingan kualifikasi dan kualifikasi yang diperlukan untuk jabatan dan kualifikasi dan kualifikasi calon dalam merekrut, mengangkat, menugaskan, dan mempromosikan ke jabatan yang sesuai dengan tugasnya.

Dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan sumber daya manusia di pengurus adalah: persiapan dan penetapan kebutuhan, akuisisi, jabatan dan jabatan, pengembangan karir, model karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, gaji, tunjangan, penghargaan, disiplin, pemecatan, pensiun dan jaminan dan perlindungan hari tua. Pemerintahan yang bagus untuk mengimplementasikan aparatur sipil negara dalam rangka reformasi birokrasi, perlu didefinisikan aparatur sipil negara sebagai suatu profesi yang bertugas mengatur dan mengembangkan diri serta bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari penyelenggaraan organisasi, yang bergerak menuju visi, misi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik adalah seperangkat faktor yang menentukan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang untuk setiap warga negara ataupun

penduduk dalam penyediaan jasa, barang hingga kebutuhan administratif oleh penyelenggara pelayanan. (Keuangan, 2009). Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik. Unsur pertama adalah setiap badan tata usaha negara, perusahaan, lembaga mandiri yang dibentuk dengan undang-undang untuk penyelenggaraan pemerintahan dan badan hukum lainnya yang didirikan khusus untuk pelayanan publik.

Unsur kedua adalah penerima, yaitu masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau tertarik untuk menerima pelayanan (penerima pelayanan) yang hampir tidak memiliki daya tawar atau tidak berada pada posisi yang sama untuk menerima pelayanan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menerima pelayanan yang baik. Pelayanan Sikap ini mendorong komunikasi dua arah untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dan mencoreng citra lembaga dengan mengefektifkan dan ironisnya mempertimbangkan keuntungan bersama. Unsur ketiga adalah kepuasan pelanggan setelah menerima pelayanan. Unsur kepuasan pelanggan adalah kepedulian penyedia layanan (negara) untuk membuat kebijakan kepuasan pelanggan dalam pelayanan publik, yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja administrasi publik.

Strategi kenaikan mutu jasa masyarakat bisa dilakukan dengan peraturan memperbaiki tata laksana jenis, pelayanan (service quality management), yaitu bagaimana memperkecil kesenjangan (gap) antar tahapan pelayanan yang diberikan lembaga dengan kepercayaan dan keyakinan. Mendefinisikan pelanggan (massa pengguna). Ketika merencanakan jenis peningkatan layanan ini, administrasi harus dapat menerapkan upaya manajemen yang membawa

tujuan pelanggan ke ambang batas dengan pendekatan piagam warga (service statement), yaitu pendekatan manajemen layanan publik yang mencakup pengguna layanan seperti layanan .artinya kepentingan dan guna pengguna layanan harus melakukan penerapan keyakinan-keyakinan good governance terhadap mutu pelayanan massa, dan jenis jasa publik mempunyai dampak positif terhadap kesenangan publik. (Selllang et al., 2017).

Menurut Bernadian dan Russel yang dikutip oleh Cardoso (1999) dalam Sunyoto (2015:138) menyatakan bahwa pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sudah menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Melalui pelatihan yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pegawai atau karyawan sehingga membuat performa mereka dalam melaksanakan pekerjaannya akan lebih maksimal sehingga dapat menunjang kinerja karyawan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Menurut Sutrisno (2014:87) dalam Mulyadi (2015:49) menyatakan bahwa disiplin merupakan alat penggerak karyawan. Tidak bisa di pungkiri bahwa disiplin merupakan hal yang penting di dalam suatu perusahaan, disiplin di terapkan guna menjaga ketertiban dan kestabilan dalam proses di tempat bekerja.

E. Pengertian POAC

Fungsi POAC sendiri dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berikut adalah pemaparan singkat tentang tiap bagian dari POAC, yang mana akan dibahas lebih dalam di bab lain:

a. Planing

Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. *Planning* telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam *planning*, manajer memperhatikan masa depan, mengatakan “Ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya”.

Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. *Planning* penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Contohnya, setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi

b. Organizing

Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. *Organizing* juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

Aspek utama lain dari *organizing* adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya. Misalnya kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Memekerjakan orang untuk pekerjaan merupakan aktifitas kepegawaian yang khas. Kepegawaian adalah suatu aktifitas utama yang terkadang diklasifikasikan sebagai fungsi yang terpisah dari *organizing*.

c. Actuating

Actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. *Actuating* adalah implementasi rencana, berbeda dari *planning* dan *organizing*. *Actuating* membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Sehingga tanpa tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi atau impian yang tidak pernah menjadi kenyataan.

d. Controlling

Controlling, memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Hal ini membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, manajer harus mengambil tindakan yang sifatnya mengoreksi. Misalnya meningkatkan periklanan untuk meningkatkan penjualan.

Fungsi dari *controlling* adalah menentukan apakah rencana awal perlu direvisi, melihat hasil dari kinerja selama ini. Jika dirasa butuh ada perubahan, maka seorang manajer akan kembali pada proses *planning*. Di mana ia akan merencanakan sesuatu yang baru, berdasarkan hasil dari *controlling*.

F. Gambaran Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana. Kabupaten Lampung Timur pada awal berdiri meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Provinsi Tingkat I Lampung, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Marga Tiga dan Sekampung Udik ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan definitif, dengan demikian Wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur ,maka jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 52 menjadi 24 kecamatan definitif dan 232 desa. Perkembangan selanjutnya, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2001 dan Nomor 06 Tahun 2002, jumlah desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 232 desa definitif dan 3 desa persiapan.

Pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan. Selanjutnya pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 Desa di Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penghapusan Kelurahan Menjadi Desa, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 Desa di

Kabupaten Lampung Timur, saat ini Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa.

Secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau 53 Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dan Kecamatan Punggur dan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

G. Hidrologi

Hidrologi berasal dari bahasa Yunani, Hydrologia, yang berarti "ilmu air". Hidrologi adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu bumi dan ilmu lingkungan, serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya (cairan, padat, gas) pada, dalam atau di atas permukaan tanah termasuk di dalamnya

adalah penyebaran daur dan perilakunya, sifat-sifat fisika dan kimia, serta hubungannya dengan unsur-unsur hidup dalam air itu sendiri. Hidrologi juga mempelajari perilaku hujan terutama meliputi periode ulang curah hujan karena berkaitan dengan perhitungan banjir serta rencana untuk setiap bangunan teknik sipil antara lain bendung, bendungan dan jembatan. 6 Secara umum Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah keberadaan air di bumi (siklus air) dan hidrologi memberikan alternatif bagi pengembangan sumberdaya air bagi pertanian dan industri. Lebihlanjut, menurut Marta dan Adidarma (1983), bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya, pergerakan dan distribusi air di bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat fisik, kimia air serta reaksinya terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Sedangkan menurut Linsley (1996), menyatakan pula bahwa hidrologi ialah ilmu yang membicarakan tentang air yang ada di bumi, yaitu mengenai kejadian, perputaran dan pembagiannya, sifat-sifat fisik dan kimia, serta reaksinya terhadap lingkungan termasuk hubungannya dengan kehidupan. Singh (1992), menyatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air bumi, termasuk di dalamnya kejadian, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen. Adapun Hidrologi yang ada di Kabupaten Lampung Timur Sebagai Berikut :

1. Hidrologi Sungai

Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih ? Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran

sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar, yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air. pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir. Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Di Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat banyak aliran sungai yang bermuara di Way Sekampung. Aliran sungai tersebut antara lain Way Ngisen, Way Capang, Way Curup, Way Nibung, Way Buyut, Way Sipin, Way Bekarang, Way Kandis Besar, Way Ulan, Way Bakun, Way Rupuyuh, Way Samping, Way Kenali dan Way Galih. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 km. Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok-kelok (meandering), dengan jumlah cabang sungai sebanyak 12 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memilki lebar berkisar 50-60 meter, kedalaman bervariasi

3,2 ? 4,5 meter, kecepatan aliran rata-rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 meter, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 1.285 meter.

2. Hidrologi Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah, dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/ Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain :

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa.
- Adanya kawasan perikanan darat.

3. Hidrologi Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung. Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

4. Hidrologi Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumberdaya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunanya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batumannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer. Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat. Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas

jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal. Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m, dengan muka air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pola penggunaan lahan seperti permukiman di perkotaan yang tidak memperhatikan arah gerakan air tanah dan jaraknya dalam penempatan septictank. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

H. Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang IKLH

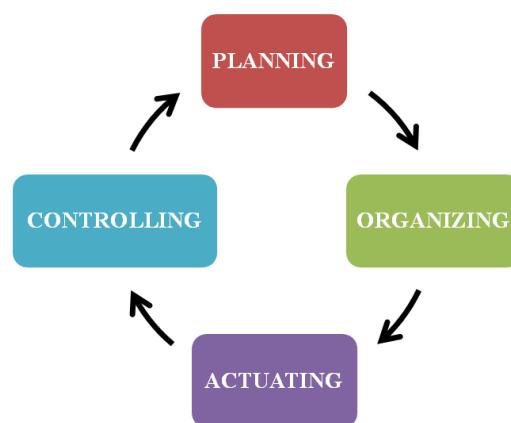
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

I. Kerangka Teori

Berdasarkan teori yang telah diuraikan maka dikembangkan suatu kerangka teori Model dari prinsip-prinsip manajemen dari George R. Terry merupakan model dasar proses dari manajemen dalam menjalankan sebuah organisasi ataupun bisnis dalam mencapai tujuan. George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Berikut sebagaimana model 4 (empat) fungsi manajemen dalam proses manajemen yang dikenalkan oleh George R. Terry.



Gambar 2.1 Kerangka Teori George R. Terry Fungsi Manajemen

1. Planning adalah Perencanaan

Planning ataupun perencanaan merupakan langkah awal yang harus diperbuat dalam sebuah organisasi ataupun bisnis dalam memikirkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai kedepannya contoh kecilnya membuat sebuah VISI dan MISI sehingga organisasi ataupun bisnis yang kita jalankan mengetahui arah dan tujuannya. Perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatankegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Usman, 2009).

Prajudi atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan ialah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bila mana, dimana, dan bagaimana cara melakukannya. Menurut George R. Terry “Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. (Sukarna, 2011, hal. 10).

2. Organizing

Organizing merupakan pengorganisasian. Adapun pengertian mengenai hal ini adalah sebuah pengelompokkan sebagaimana orang didalamnya dapat digerakkan sesuai aturan kesatuan sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan tersebut. Maka dalam hal ini perlu adanya perencanaan yang baik dalam membuat sebuah struktur organisasi karena berdampak pada proses keberhasilan manajemen mungkin hal kecilnya seperti membuat siapa pemimpinnya, sekretarisnya, bendaharanya dan bidang-bidang lainnya

serta membuat jobdesk. untuk setiap strukturnya sehingga apa yang akan dibuat akan terlaksana dengan baik sehingga mempermudah proses manajemen dalam mendapatkan keberhasilan serta mencapai tujuan.

3. Actuating

Dalam sebuah proses manajemen meskipun sudah memiliki perencanaan yang matang serta baik, dan memiliki struktur organisasi yang begitu bagus tanpa adanya tindakan atau aksi dalam perencanaan itu maka bagaimana sebuah organisasi ataupun bisnis dapat mencapai keberhasilan dalam tujuannya. Actuating sendiri merupakan pergerakan. Pergerakan pada dasarnya merupakan tindakan seorang pemimpin yang membimbing serta mengarahkan dan menggerakkan seluruh bagian pada struktur organisasi dalam pelaksanaan proses manajemen sehingga tercapainya sebuah tujuan dan mendapatkan keberhasilan. Menurut George R. Terry “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”. (Sukarna, 2011)

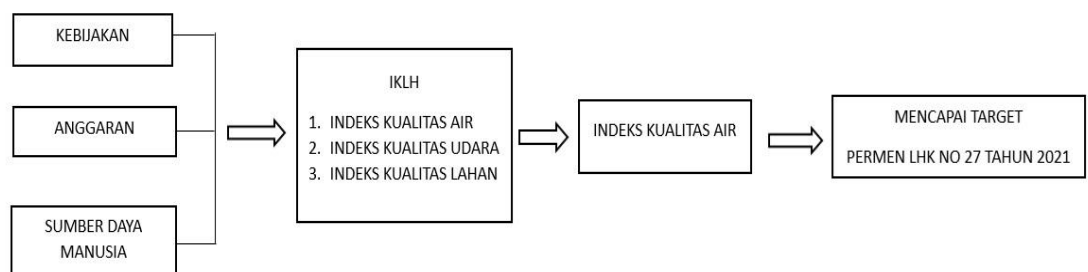
4. Controlling

Controlling sendiri merupakan pengawasan serta pengendalian. Controlling sangat berperan penting dalam melihat apakah proses manajemen berjalan dengan baik mencapai tujuan sasaran ataupun sebaliknya. Maka dengan itu langkah yang harus diambil dalam controlling mengamati , menilai, mengevaluasi dan mengoreksi setiap langkah perencanaan berjalan sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Menurut

George R. Terry “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”. (Sukarna, 2011)

J. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori, peneliti menggunakan metode POAC dalam penelitian dengan mengevaluasi Nilai Indeks Kualitas Hidup berdasarkan Kebijakan, Anggaran dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lampung Timur. Maka Adapun Kerangka Konsep penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Konsep